

Abdurrahman Wahid's administration system tended to shift towards a more democratic regime. Through this study, it can be concluded that in the transition to a democratic regime, restructuring the role of the military in political life is an important prerequisite that must be carried out.

Keywords: Military Role, Suharto, Abdurrahman Wahid.

Pendahuluan

Membahas mengenai bagaimana hubungan sipil dan militer dalam realitas politik di negara demokrasi merupakan hal yang selalu menarik untuk dilakukan, khususnya di negara yang bersifat heterogen seperti Indonesia yang rentan dengan disintegrasi. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesungguhnya memiliki peran utama sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Akan tetapi tidak jarang dapat dirasakan bagaimana militer mengambil perannya dalam politik itu sendiri.

Perjalanan Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan ternyata juga tidak luput dari peran militer dan politiknya.

Reformasi yang bergulir di tahun 1998 merupakan salah satu momentum penting dalam sejarah relasi sipil-militer di Indonesia. Bagaimana kultur politik dan birokrasi yang kental akan dominasi militer pada 32 tahun masa pemerintahan Soeharto terutama dengan

adanya konsep Dwi Fungsi ABRI, yang kemudian beralih ke pemerintahan Abdurrahman Wahid yang mengedepankan pandangan mengenai supremasi sipil khususnya dalam hal politik dan birokrasi.

Tulisan ini mencoba membahas perbandingan mengenai peran militer pada masa pemerintahan Soeharto dengan pemerintahan Abdurrahman Wahid dengan pendekatan kualitatif sosial historis.

Tinjauan Pustaka

Kepemimpinan Otoritarian dan Demokratis

Kepemimpinan merupakan faktor utama dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi juga dapat mempengaruhi budaya yang terdapat dalam organisasi. Budaya dalam organisasi ini mempunyai fungsi antara lain: menetapkan batas dan wewenang, memberikan rasa identitas kepada anggotanya (Faturahman, 2018).

Berdasarkan pemahaman di atas dapat diperoleh gambaran umum mengenai dua karakteristik kepemimpinan yang mewarnai perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan dan mengonstruksi bagaimana budaya organisasi kenegaraan ini dibangun oleh pemimpinnya. Kepemimpinan era Soeharto yang cenderung bersifat otoritarian dan era Abdurrahman Wahid yang dipandang lebih demokratis.

Selama 32 tahun orde baru berkuasa, rezim menghadirkan karakteristik politik utama, yaitu: (1) Lembaga kepresidenan yang terlampaui dominan; (2). Rendahnya kesetaraan di antara lembaga tinggi Negara; (3). Rekrutmen politik yang tertutup; (4). Birokrasi sebagai instrument kekuasaan; (5). Kebijakan publik yang tidak transparan; (6). Sentralisasi; (7). Implementasi HAM yang masih rendah; (8). Sistem peradilan yang tidak independen.¹

Alam politik dan pemerintahan yang cenderung otoriter pada era kepemimpinan Soeharto di mana

kekuasaan politik terkonsentrasi pada seorang pemimpin atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu kemudian berakhir seiring dengan bergulirnya Reformasi di tahun 1998.

Tampuk kepemimpinan yang dipegang oleh Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dinilai sebagai salah satu pijakan yang fundamental dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebelum menjadi presiden, Abdurrahman Wahid yang sering disapa dengan Gus Dur adalah seorang yang gigih dalam memperjuangkan demokrasi dan mengkritisi pemerintahan orde baru yang dinilai otoriter.

Gaya kepemimpinan Gus Dur yang sangat khas, humoris dan penuh guyonan-guyonan segar inilah seakan tidak ada jarak antara lawan atau kawan. Hal tersebut sangat berlawanan dengan gaya kepemimpinan Soeharto yang cenderung bersifat formalistik dan terkesan serius. Hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh latar belakang militer yang dimiliki oleh Soeharto, sedangkan Gus Dur besar dan tumbuh di lingkungan santri atau pelajar yang bersifat lebih terbuka.

Kepemimpinan yang bersifat otoritarian di kalangan militer merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri dan akan selalu tumbuh subur

¹ Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan PUSKAP, hlm.149 dalam Adiwilaga, R. (2018). *Aksi Kamisan Sebagai Representasi Civil Society dan Respon Pemerintah Era Susilo Bambang Yudhoyono Menyikapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lampau*. Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 10(3), 14-32. Retrieved from <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/1262>

sebagai salah satu ciri khas budaya organisasi di lingkungan militer. Salah satu alasan yang sering dimunculkan mengapa budaya tersebut dipelihara dalam organisasi militer adalah guna mendukung tata perilaku prajurit di dalam kerangka budaya kerja dengan sistem hirarkhi atau komando, dikarenakan lingkup pekerjaan prajurit yang diberikan senjata sebagai alat pendukung dalam bekerja. Budaya kerja yang disiplin, loyalitas, dan sistem komando diperlukan guna menjamin senjata dipergunakan sesuai tujuan dan standar operasi prosedur (SOP).

Profesionalisme Militer

Seorang ilmuan politik Amerika, Samuel P. Huntington² berpandangan bahwa perubahan korps perwira militer dari bentuk “penakluk” (*warrior*) menjadi kelompok profesional ditandai dengan bergesernya nilai dari “tentara pencari keuntungan” menjadi “tentara karena panggilan suci” contohnya pengabdian kepada Negara. Huntington memberikan elaborasi tentang tumbuhnya profesionalisme militer, menurutnya memiliki tiga ciri sebagai berikut :

Keahlian. Suatu kekuatan militer memerlukan pengetahuan yang mendukung untuk mampu mengorganisir, merencanakan, dan mengarahkan aktivitasnya baik dalam keadaan perang maupun damai.

Tanggung jawab sosial yang khusus. Seorang perwira militer disamping memiliki nilai-nilai moral yang tinggi yang terpisah dari insentif ekonomi juga mempunyai tanggung jawab pokok kepada negara. Berbeda dengan masa sebelumnya, saat itu seorang perwira seolah-olah “milik pribadi” komandannya dan harus setia kepadanya. Pada masa profesionalisme seorang perwira berhak mengoreksi komandannya jika sang komandan bertentangan dengan kepentingan negara (*national interest*).

Karakter koorporasi (corporate character) yang melahirkan rasa esprit de corps yang kuat. Berbeda dengan kelompok profesional yang lain, korps perwira militer merupakan suatu “birokrasi profesional” yang anggota-anggotanya mengabdikan pada birokrasi negara, tapi sebagai suatu satuan dalam birokrasi negara korps perwira merupakan unit sosial yang otonom, yang memiliki kemandirian dalam birokrasi, lembaga pendidikan, jurnal, asosiasi, kebiasaan, dan tradisi.

² Samuel P. Huntington, *The Soldier and The State: The Theory and Politics Civil-Military Relations*, Harvard University Press, Cambridge, 1957, hlm 79.

Birokrasi, Korporatisme, dan Profesi Militer

Militer adalah sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentingan umum tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu. Militer merupakan suatu profesi sukarela karena setiap individu bebas memilih suatu pekerjaan di dalamnya, namun dia juga bersifat memaksa karena para anggotanya tidak bebas untuk membentuk perkumpulan sukarela melainkan terbatas kepada suatu situasi hirarki birokrasi.

Dua variabel kualitatif yang sangat penting dari profesionalisme militer adalah pengawasan dan keahlian (*control and skills*).⁴ Militer dikontrol pada dua tingkat organisasi. Pertama kontrol yang bersifat internal berupa satu kelompok rekan-rekan yang mengawasi keserasian internal korps perwira sebagai suatu kelompok profesi dan sosial. Kedua kontrol ekstern dan disiplin berupa jenjang wewenang. Variabel yang kedua adalah keahlian, secara historis, atribut paling penting dari prajurit profesional adalah keberanian dan disiplin. Akan tetapi prajurit profesional pada zaman

sekarang harus dapat menjadi seorang birokrat sekaligus pahlawan. Oleh karena itu ia perlu mempelajari kecakapan-kecakapan manajemen modern dan strategi.

Konsekuensi apapun yang diciptakan terhadap citra positif para prajurit, profesionalisme korporasi militer ternyata telah memperluas horizon sosial dan politik militer. Konsep yang mengatakan bahwa profesionalisme militer menjauhkan prajurit dari politik sebagian berasal dari tradisi klasik teori administrasi dan administrasi pemerintahan Amerika. Tradisi tersebut dibangun di atas anggapan dasar bahwa politik terpisah dari administrasi, di mana pembuatan keputusan (merupakan tanggung jawab pejabat-pejabat yang dipilih rakyat) dipisahkan dari penerapan kebijaksanaan (merupakan tanggung jawab para pejabat yang ditunjuk).

Perbedaan tersebut dikemukakan untuk menjelaskan pemisahan antara para ahli dari politisi, akan tetapi perbedaan tersebut tidak lagi berlaku. Teori administrasi yang baru bersifat fusionis, teori ini mengakui bahwa birokrasi dan politisi, semuanya berpadu satu sama lain dengan cara simbiosis. Suatu pembauran antara eksklusivisme kelompok dan tanggung jawab

⁴ Peter Balu and Richard Scoot, *Formal Organization*, SanFrancisco, Chandler, 1962, hlm 54

Orde Baru ialah penugas karyaan ABRI dalam lembaga / instansi / badan / organisasi di luar jajaran ABRI sebagai pelaksana Dwi Fungsi ABRI. Maksud dan tujuan dari penugasan tersebut adalah pertama, sebagai pengamanan politik ideologis terutama pada saat awal Orde Baru. Kedua, dalam rangka penyuksesan pembangunan nasional, untuk tercapainya sasaran program-program pembangunan yang tercantum dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Dilihat dari segi motivasi, dorongan dan urgensinya, maka penugaskarya prajurit ABRI pada masa Orde Baru dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Penugas karyaan yang sifatnya wajib untuk dipenuhi karena hal itu telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain untuk mengisi perwakilan golongan karya ABRI dalam Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat: MPR, DPR, dan DPRD.
2. Penugasan dalam jabatan-jabatan yang pejabatnya ditentukan atas kehendak rakyat berdasarkan pilihan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR / DPR / DPRD⁶ yaitu untuk jabatan Presiden / Wakil Presiden berdasarkan pemilihan di MPR, Ketua / Anggota BPK dan Hakim Agung di Mahkamah Agung, yang perlu di usulkan / dimintakan

⁶ Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD setelah beberapa kali diubah, terakhir pada masa Soeharto dengan UU No. 2 / 1985

pertimbangan dari DPR , jabatan-jabatan Gubernur / Kepala Saerah tingkat I dan Bupati / Walikota Kota Madya Kepala Daerah tingkat II yang penentuannya berdasarkan pemilihan di DPRD I / II. Dalam hal ini ABRI mengajukan calon-calonnya melalui Fraksi ABRI atau memberikan persetujuan bagi prajurit ABRI yang dicalonkan oleh Fraksi Organisasi Peserta Pemilu dalam DPRD I / II.

3. Penugasan atas penunjukan dari Presiden / Kepala Negara antara lain untuk jabatan di Perwakilan RI di luar negeri, sebagai Menteri atau pejabat lain yang setingkat di bidang eksekutif.
4. Penugasan atas permintaan dari pemerintah seperti uantuk mengisi jabatan eselon I / II dan sebagainya.
5. Penugasan ABRI dalam organisasi kemasyarakatan, atas permintaan dari organisasi yang bersangkutan kepada Pimpinan ABRI.⁷

Dalam pandangan Orde Baru, penugas karyaan di luar instansi ABRI, pada dasarnya bukan untuk hanya memberikan pekerjaan kepada yang bersangkutan (*empoyment oriented*) tetapi berdasarkan untuk memenuhi misi (*mission oriented*). Oleh karena itu prosesnya sangat selektif dan berdasarkan pertimbangan yang matang antara lain kualitas moral, keahlian teknis,

⁷ Soebijono et. al. *Dwi Fungsi ABRI, Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hlm 137

dan manajerial serta akseptabilitas di lingkungan kerjanya. Untuk itu, dalam rangka penugaskaryaan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan :

1. Jumlah tenaga terutama perwira ABRI yang terbatas, apalagi benar-benar memenuhi syarat keahlian (profesionalisme) untuk jabatan di luar ABRI
2. Memenuhi kemungkinan timbulnya “sikap penolakan” terhadap seorang dari luar lingkungan pada umumnya dan ABRI pada khususnya, karena lazimnya berlaku dalam pembinaan personel ialah *promotion from within*.
3. Kemungkinan adanya kecenderungan penempatan yang berbau “penyaluran” antara lain karena ikatan korps atau hubungan “teman seperjuangan” yang sangat kuat di lingkungan ABRI
4. Kebutuhan ABRI sendiri akan tenaga profesional non-militer untuk mengisi ABRI.⁸

Birokrasi Pada Masa Orde Baru

Pada awal masa Orde Baru, keadaan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan masih dalam suasana rawan akibat pemerontakan G 30 S / PKI. Pemerintah di bawah Presiden Soeharto segera melakukan usaha-usaha pemulihan dengan melakukan pembangunan di segala bidang. Model pembangunan tersebut cenderung bercorak teknokratis dan

birokratis. Kecenderungan ini tampaknya di bentuk secara sekaligus oleh kebutuhan objektif berupa krisis ekonomi, politik, dan sosial pada saat itu dan kebutuhan subjektif penguasa untuk melanggengkan kekuasaan rezim.⁹

Birokrasi menjadi alat pembangunan yang penting, tidak saja untuk tujuan teknis membantu formulasi dan realisasi kebijakan pembangunan tetapi juga untuk tujuan politik, yaitu menjaga stabilitas kekuasaan negara secara internal dan melakukan penguasaan terhadap masyarakat secara eksternal. Untuk tujuan ini, terdapat sekurang-kurangnya tiga ciri birokrasi khas Orde Baru:

1. Melakukan pembesaran jumlah anggota birokrasi secara kuantitatif, seperti dalam dua puluh tahun (1960-1980) jumlah anggota birokrasi bertambah lebih dari 5 kali lipat.
2. Memberikan kewewenangan besar kepada birokrasi untuk menjadi perpanjangan tangan negara dalam mengontrol masyarakat; dan yang terpenting
3. Memasukkan kekuatan militer dalam birokrasi, baik pusat maupun daerah. Dimasukkannya militer sebagai birokrasi pemerintahan semakin memperkuat posisi pemerintah dalam membuat kebijakan baik teknis maupun politik untuk

⁸ Ibid, hlm 138

⁹ R.Eep Saefulloh Fattah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 133

kepentingan mempertahankan kekuasaan.

Meskipun secara umum posisi-posisi kekuasaan dibagi dengan orang-orang sipil, namun orang-orang sipil harus menyesuaikan diri dengan sistem di mana kekuasaan terletak di tangan militer. Pada masa pemerintahan Orde Baru, meskipun pemerintah mengklaim dirinya menganut sistem demokrasi namun apa yang terjadi adalah sebaliknya, kontrol militer terhadap sipil dengan alasan stabilitas politik dan keamanan untuk suksesnya pembangunan ekonomi.

2. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid Pembaharuan dalam Tubuh ABRI

Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 oleh gerakan mahasiswa yang menatas namakan diri sebagai gerakan reformasi, maka posisi ABRI dalam peta perpolitikan di Indonesia ikut jatuh pula. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ABRI adalah kekuatan politik Orde Baru bersama Golkar. Jatuhnya Orde Baru berarti jatuhnya ABRI sebagai penyangga pemerintahan, karena ABRI selama Orde Baru lebih identik dengan alat pemerintah yang berkuasa dari pada alat penyangga negara dari segala ancaman.

Kecenderungan ABRI yang lebih mementingkan dan memelihara kekuasaan membawa ABRI terjebak pada pola-pola pendekatan yang lebih represif. Sehingga tak jarang oknum-oknum ABRI bertindak di luar

pegangan yang mereka ucapkan setiap apel upacara, yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Pelanggaran-pelanggaran dalam berbagai bentuk baik kriminal maupun motif politik, semakin lama semakin terakumulasi. Sehingga pada momentum yang tepat yaitu pada saat jatuhnya pemerintahan Orde Baru meledaklah semua akumulasi pelanggaran ABRI pada masa lalu tersebut.

ABRI dibenci dan dihujat oleh rakyat karena lebih dianggap sebagai pelindung dan pengaman Orde Baru selama 32 tahun dari pada pelindung dan pengayom rakyat. Masyarakat menganggap bahwa itu semua tidak lain karena akses peran ABRI dengan dwi fungsinya, terutama peran sosial politik yang terlalu dominan.

Untuk menepis keragu-raguan di kalangan masyarakat, khususnya mereka yang menghendaki dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI, maka Panglima TNI Laksamana Widodo AS mengadakan rapat pimpinan (rapim) TNI di Cilangkap tanggal 19-20 Mei 2000 di Cilangkap yang di hadiri oleh 146 peserta, terdiri dari para pemimpin dan staf dari Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan pejabat tinggi Departemen Pertahanan Keamanan serta para pimpinan Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI, Ketua Umum, dan Ketua Fraksi TNI-Polri.

Dari kesimpulan rapim tersebut, TNI secara tegas bertekad untuk bersungguh-sungguh melaksanakan pembaharuan secara menyeluruh dalam rangka kembali ke jati diri TNI di bidang pertahanan negara tidak lagi bermain dalam kegiatan politik praktis.

Untuk mengukuhkan secara legalitas formal peran TNI sebagai alat pertahanan, maka pada tanggal 18 Agustus 2000 melalui Tap MPR Nomor VII / MPR / 2000 di tetapkan bahwa disamping perannya sebagai alat negara dalam pertahanan, TNI juga mempunyai tugas bantuan dan ikut serta dalam penyelenggaraan negara.

Supremasi Sipil

Naiknya Abdurrahman Wahid dalam tampuk kepemimpinan nasional membawa harapan besar bagi perkembangan proses demokratisasi di Indonesia, mengingat latar belakang Abdurrahman Wahid sebagai pelopor dan pejuang demokrasi sejak pemerintahan Orde Baru berkuasa.

Jika rezim pemerintahan Orde Baru sangat otoriter di mana kekuatan bertumpu pada satu orang Presiden yang mampu mengontrol kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaan, maka dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid sistem pemerintahan cenderung beralih menuju ke sebuah rezim yang lebih demokratik. Dalam peralihan menuju rezim demokrasi, penataan kembali peran militer dalam kehidupan politik merupakan prasyarat penting yang harus di jalankan.¹⁰

Langkah awal Presiden Abdurrahman Wahid dalam menata peran TNI terlihat ketika ia melakukan kebijakan dengan memisahkan jabatan Menteri Pertahanan dengan Panglima TNI. Kebijakan

ini dilanjutkan dengan mengisi jabatan Menteri Pertahanan berasal dari orang sipil, yaitu Prof Dr. Juwono Sudarsono, di mana dalam sejarah Orde Baru, Menhankam selalu diduduki oleh orang militer.¹¹

Jabatan Menhankam dan Pangab dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dipisah menjadi dua jabatan yaitu Panglima TNI dan Menteri Pertahanan. Sehubungan dengan adanya reformasi internal di tubuh ABRI di mana nama ABRI di ganti kembali menjadi TNI , membawa konsekwensi POLRI harus dipisah dari tubuh ABRI yang selanjutnya kedudukannya di bawah Presiden.

Dengan pemisahan Polisi dari tubuh ABRI, maka peran masing-masing institusi juga mengalami perubahan, yakni TNI berperan sebagai alat negara yang bertugas dalam bidang pertahanan dan POLRI berperan dalam bidang keamanan (kabtibmas). Dengan adanya pemisahan secara organisasi antara TNI dan POLRI yang terhitung mulai 1 April 1999, dimana pada masa lalu POLRI dalam kegiatan oprasionalnya bertanggung jawab kepada Menhankam dan pembinaan kemampuannya bertanggung jawab kepada Panglima ABRI, maka sejak itu POLRI kedudukannya berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Konsekwensi dari pemisahan tersebut membawa nama Dephankam diubah menjadi Departemen

¹⁰ Morris Janowitz, *The Military Intervenes: Case Studies in Political Development*, Russel Sage, New York, 1988, hlm ix-xii

¹¹ Arif Yulianto, *Hubungan Sipil Militer Di Indonesia Pasca Orba, Di Tengah Pusaran Demokrasi*, Raja Grarfindo, Jakarta, 2002, hlm 392

Pertahanan (Dephan) mengingat TNI tidak lagi bertugas dalam bidang keamanan.

Pada pemerintahan Abdurrahman Wahid muncul adanya kecenderungan yang mengarah pada supremasi sipil. Hal ini dapat di lihat, disamping karena militer secara yuridis telah kembali ke peran semula sebagai alat negara yang mengurus bidang pertahanan, tidak lagi terlibat dalam politik, juga di karenakan arus gelombang demokrasi di seluruh dunia menghendaki adanya sistem pemerintahan yang demokratis. Wujud supremasi sipil pada pemerintahan Abdurrahman Wahid terlihat dalam langkahnya yang berani memasang orang sipil di posisi Menteri Pertahanan dan menaruh Laksamana Angkatan Laut pada posisi Panglima TNI yang selama ini selalu di pegang oleh Jenderal Angkatan Darat.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Suharto ini, peran militer melalui Dwi Fungsi ABRI sangat didominasi peran sosial politiknya dari pada peran pertahanan keamanan. Birokrasi menjadi alat pembangunan yang penting, salah satunya untuk tujuan politik. Meskipun secara umum posisi-posisi kekuasaan dibagi dengan orang-orang sipil, namun orang-orang sipil harus menyesuaikan diri dengan sistem di mana kekuasaan terletak di tangan militer.

Naiknya Abdurrahman Wahid membawa harapan besar bagi perkembangan proses demokratisasi di Indonesia. Langkah awal Presiden Abdurrahman Wahid dalam menata peran TNI terlihat ketika ia melakukan kebijakan dengan memisahkan jabatan Menteri Pertahanan dengan Panglima TNI. Kebijakan ini dilanjutkan dengan mengisi jabatan Menteri Pertahanan berasal dari orang sipil, di mana dalam sejarah Orde Baru, Menhankam selalu diduduki oleh orang militer. Selain itu, sehubungan dengan adanya reformasi internal di tubuh ABRI, nama ABRI diganti kembali menjadi TNI, membawa konsekwensi POLRI harus dipisah dari tubuh ABRI yang selanjutnya kedudukannya di bawah Presiden.

Daftar Rujukan

- Adiwilaga, R. (2018). *Aksi Kamisan Sebagai Representasi Civil Society dan Respon Pemerintah Era Susilo Bambang Yudhoyono Menyikapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lampau*. Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 10(3), 14-32.
- Balu, Peter and Scoot, Richard, (1962), *Formal Organization*,

SanFransisco, Chandler, 1962, hlm
54

Fattah, R.Eep Saefulloh, (2002), *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Faturahman, B. M. (2018). Kepemimpinan dalam Budaya Organisasi. *MADANI*, 10(1), 1-11.

Huntington, Samuel P., (1957), *The Soldier and The State: The Theory and Politics Civil-Military Relations*, Harvard University Press, Cambridge.

Janowitz, Morris, (1988), *The Military Intervenes: Case Studies in Political Development*, Russel Sage, New York.

Perlmutter, Amos, (2000), *Militer dan Politik*, diterjemahkan dari buku aslinya *The Military and Politics and Modern Times* oleh Shat Simora, RajaGrafindo, Jakarta.

Soebijono et. al., (1997), *Dwi Fungsi ABRI, Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Yulianto, Arif, (2002), *Hubungan Sipil Militer Di Indonesia Pasca Orba, Di Tengah Pusaran Demokrasi*, Raja Grafindo, Jakarta.